

Peran Pemerintah dalam Mengendalikan Tingkat Daya Saing Kelompok Petani di Bolaang Mongondow Sulawesi Utara

Rifky Pakaya, Arinny Astarty Gobel, Firka Manggo, Abdul Latif

Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Sultan Amai Gorontalo

rifkypakaya7@gmail.com, arinygobel@gmail.com, firkamanggo0@gmail.com,

abdullatif1003@gmail.com

korespondensi penulis: rifkypakaya7@gmail.com

Abstract. *The role of government in agriculture is very important in determining economic policy, in planning to mobilize actors there must be readiness, seriousness and commitment to implement it. In an effort to establish regional autonomy, readiness to face future challenges and effective and efficient management of the regional economy by utilizing regional potential and resources. support that has a comprehensive design is needed, in order to obtain information that is in accordance with the problem formulation and research objectives. The method used in this research is a qualitative descriptive research method. This research is located in Bolaang Mongondow district (North Sulawesi). Regarding the role of the government in controlling the level of competitiveness of farmer groups in Bolaang Mongondow district (North Sulawesi). Data collection methods This research uses secondary data. The role of the government as a regulator is that the government prepares the implementation of development (issuing regulations in the framework of the effectiveness and orderliness of development administration). capital through providing capital assistance to the community. The government as a catalyst, the village government has a position as an agent that accelerates the development of village potential. The research results show that the government's role in controlling the level of competitiveness of farmer groups in Bolaang Mongondow, North Sulawesi, is very important and has a positive impact. With support and assistance from the government, farmers can increase their productivity, expand markets, and increase their income.*

Keywords: *Government, level of competitiveness, Bolaang Mongondow farmer group.*

Abstrak. Peran pemerintah di suatu Pertanian sangat penting dalam menentukan kebijakan perekonomian dalam perencanaan menggalang pelaku harus ada kesiapan serta keseriusan dan juga komitmen untuk melaksanakannya. dalam upaya menetapkan otonomi daerah kesiapan dalam melalui tantangan kedepan serta pengelolaan ekonomi daerah yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan potensi daerah dan daya dukung yang dimiliki. Rancangan menyeluruh diperlukan, Agar dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif kualitatif Penelitian ini berlokasi di kabupaten Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara). Terkait tentang peran pemerintah dalam mengendalikan tingkat daya saing kelompok petani di kabupaten Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara). Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Peran pemerintah sebagai regulator yaitu pemerintah menyiapkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peratursn-peraturan dalam rangka efektifitas dan tata tertib administrasi pembangunan). Sebagai fasilitator pemerintah desa bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal, kepada masyarakat. Pemerintah sebagai katalisator pemerintah desa berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengendalikan tingkat daya saing kelompok petani di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sangat penting dan memberikan dampak positif. Dengan adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah, petani dapat meningkatkan produktivitas mereka, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan mereka.

Kata Kunci: Pemerintah, Tingkat daya saing, Kelompok petani Bolaang Mongondow.

LATAR BELAKANG

Peran pemerintah di suatu Pertanian sangat penting dalam menentukan kebijakan perekonomian dalam perencanaan menggalang pelaku harus ada kesiapan serta keseriusan dan juga komitmen untuk melaksanakannya. dalam upaya menetapkan otonomi daerah kesiapan dalam melalui tantangan kedepan serta pengelolaan ekonomi daerah yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan potensi daerah dan daya dukung yang dimiliki. pemerintah jugamemerlukan strategi untuk sebuah perekonomian Peran pemerintah tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata pada penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pemerintah yang dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Besarnya potensi yang dimiliki dan besarnya kebutuhan dibidang Pertanian diharuskan adanya pemberdayaan masyarakat terutama petani. Dimana Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan atau cara dalam upaya untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya atau mampu mengatasi persoalan dalam dirinya maupun lingkungannya. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan masyarakat menjadi mandiri dan mampu dalam menentukan pilihan dalam mengatasi permasalahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 1 BAB I, dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

“Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan system dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan Petani”.

Pemberdayaan kita harus melihat dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga dalam menjadi petani harus memggembangkan kemampuan dan pengetahuan seorang petani dalam kerjasama pemerintah inilah yang sangat di butuhkan peran pemerintah dalam mengendalikan tingkat daya saing apalagi di Bolaang Mongondow banyak daya saing yang harus ada peran pemerintah didalamnya.

Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan salah satu daerah otonom dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).

Di tahun 2005 Kabupaten Bolaang Mongondow terbagi dalam beberapa wilayah kecamatan dengan ibukota Kabupaten terletak di Kecamatan Kotamobagu yang juga merupakan pusat pemerintahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlangsung selama ini, selain telah menghasilkan kemajuan yang cukup signifikan. Semangat otonomi daerah juga telah menciptakan perubahan besar dalam tatanan pemerintahan serta telah memberikan nuansa baru dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dilihat dari sejarah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka berdasarkan data Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow disebutkan bahwa Penduduk asli Bolaang Mongondow berasal dari keturunan Gumalangit dan Teneduata serta Tumotoibokol dan Tumotoibokat, awalnya mereka tinggal di gunung Komasaan (Bintauna).

Kemudian menyebar ke timur di tudu in Lombagin, Buntalo, Pondoli', Ginolantungan sampai ke pedalaman tudu in Passi, tudu in Lolayan, tudu in Sia', tudu in Bumbungon, Mahag, Siniow dan lain-lain. Peristiwa perpindahan ini terjadi sekitar abad 8 dan 9. Nama Bolaang berasal dari kata "bolango" atau "balangon" yang berarti laut. Bolaang atau golaang dapat pula berarti menjadi terang atau terbuka dan tidak gelap, sedangkan Mongondow dari kata 'momondow' yang berarti berseru tanda kemenangan.

Bolaang terletak di tepi pantai utara yang pada abad 17 sampai akhir abad 19 menjadi tempat kedudukan istana raja, sedangkan Mongondow terletak sekitar Kotamobagu. Daerah pedalaman sering disebut dengan 'rata Mongondow'. Dengan bersatunya seluruh kelompok masyarakat yang tersebar, baik yang berdiam di pesisir pantai maupun yang berada di pedalaman Mongondow di bawah pemerintahan Raja Tadohe, maka daerah ini dinamakan Bolaang Mongondow. Setiap kelompok keluarga dari satu keturunan dipimpin oleh seorang Bogani (laki-laki atau perempuan) yang dipilih dari anggota kelompok dengan persyaratan : memiliki kemampuan fisik (kuat), berani, bijaksana, cerdas, serta mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan kelompok dan keselamatan dari gangguan musuh. Mokodoludut adalah punu' Molantud yang diangkat

berdasarkan kesepakatan seluruh bogani.Mokodoludut tercatat sebagai raja (datu yang pertama).Sejak Tomponu'on pertama sampai ketujuh, keadaan masyarakat semakin maju dengan adanya pengaruh luar (bangsa asing).

Perubahan total mulai terlihat sejak Tadohe menjadi Tomponu'on, akibat pengaruh pedagang Belanda dirubah istilah Tomponu'on menjadi Datu (Raja). Tadohe dikenal seorang Datu yang cakap, system bercocok tanam diatur dengan mulai dikenalnya padi, jagung dan kelapa yang dibawa bangsa Spanyol pada masa pemerintahan Mokoagow (ayah Tadohe).

Tadohe melakukan penggolongan dalam masyarakat, yaitu pemerintahan (Kinalang) dan rakyat (Paloko').Paloko' harus patuh dan menunjang tugas Kinalang, sedangkan Kinalang mengangkat tingkat penghidupan Paloko' melalui pembangunan disegala bidang, sedangkan kepala desa dipilih oleh rakyat.Tadohe berhasil mempersatukan seluruh rakyat yang hidup berkelompok dengan bogannya masing-masing, dan dibentuk sistem pemerintahan baru.Seluruh kelompok keluarga dari Bolaang Mongondow (Passi dan Lolayan), Kotabunan, Dumoga, disatukan menjadi Bolaang Mongondow.

Di masa ini mulai dikenal mata uang real, doit, sebagai alat perdagangan. Pada zaman pemerintahan raja Cornelius Manoppo, raja ke-16 (1832), agama Islam masuk daerah Bolaang Mongondow melalui Gorontalo yang dibawa oleh Syarif Aloewi yang kawin dengan putri raja tahun 1866. Karena keluarga raja memeluk agama Islam, maka agama itu dianggap sebagai agama raja, sehingga sebagian besar penduduk memeluk agama Islam dan turut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dalam beberapa segi kehidupan masyarakat. Sekitar tahun 1867 seluruh penduduk Bolaang Mongondow sudah menjadi satu dalam bahasa, adat dan kebiasaan yang sama (menurut N. P Wilken dan J. A. Schwarz).

Pada tanggal 1 Januari 1901, Belanda dibawa pimpinann Controleur Anton Cornelius Veenhuizen bersama pasukannya secara paksa bahkan kekerasan berusaha masuk Bolaang Mongondow melalui Minahasa, setelah usaha mereka melalui laut tidak berhasil dan ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Riedel Manuel Manoppo dengan kedudukan istana raja di desa Bolaang. Raja Riedel Manuel Manoppo tidak mau menerima campur tangan pemerintahan oleh Belanda, maka Belanda melantik Datu Cornelis Manoppo menjadi raja dan mendirikan komalig (istana raja) di Kotobangon pada tahun 1901.Pada tahun 1904, dilakukan perhitungMongondow dan berjumlah 41.417 jiwa.

Pada tahun 1906, melalui kerja sama dan kesepakatan dengan raja Bolaang Mongondow, W. Dunnebier mengusahakan pembukaan Sekolah Rakyat dengan tiga kelas yang dikelola oleh zending di beberapa desa, yakni : desa Nanasi, Nonapan, Mariri Lama, Kotobangon, Moyag, Pontodon, Passi

Popo Mongondow, Otam, Motoboi Besar, Kopandakan, Poyowa Kecil dan Pobundayan dengan total murid sebanyak 1.605 orang, sedangkan pengajarnya didatangkan dari Minahasa. Pada tahun 1937 dibuka di Kotamobagu sebuah sekolah Gubernemen, yaitu Vervolg School (sekolah sambungan) kelas 4 dan 5 yang menampung lulusan sekolah rakyat 3 tahun.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”. Maurice Duverger, (2010: 103) berpendapat bahwa Istilah “peran” (role) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional. Menurut Maurice Duverger, (2010: 102) bahwa “Peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status”. Sedangkan Stoetzeldalam Rafael Raga Maran, (2007: 50) mengatakan bahwa “Status adalah pola perilaku kolektif yang secara normal bisa diharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain, sedangkan peranan adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang”. Sebagai mana halnya dengan kedudukan maka peranan juga tidak terpisahkan pada diri manusia. Peranan menurut Abdulsyani, (2012 : 94) Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat berpendapat bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Wahyu Prianto, (2023: 387-388) “Peran Pemerintah Desa sangat penting dalam mendukung sektor pertanian berikut ini adalah beberapa peran penting Pemerintah Desa dalam pertanian;

1. Penyediaan infrastruktur pemerintah Desa bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur dasar yang diperlukan dalam kegiatan pertanian, seperti jalan, Irigasi, saluran air, dan jaringan listrik. infrastruktur yang baik akan memudahkan Petani dalam mengakses lahan pertanian, memasarkan hasil panen dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan pertanian
2. Pengembangan lahan pertanian. Pemerintah desa dapat berperan dalam mengidentifikasi, mengelola dan mengembangkan potensi, lahan pertanian di wilayah mereka. mereka dapat membantu petani dalam mengadakan lahan, menyediakan sumber daya alam, dan pemanfaatan teknologi pertanian yang tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.
3. Pemberian bantuan dan subsidi Pemerintah Desa dapat memberikan bantuan dan subsidi kepada petani untuk mendukung kegiatan pertanian, hal ini berupa bantuan bibit unggul, pupuk, pestisida, alat pertanian, dan peralatan yang lainnya. Subsidi juga dapat diberikan dalam bentuk pembebasan pajak atau pengurangan biaya untuk mengurangi beban finansial petani.
4. Pelatihan pendampingan Pemerintah desa dapat mengorganisir pelatihan dan pendampingan untuk Petani dalam bidang pertanian. perhatian ini dapat mencakup teknik bertani yang baik, pengelolaan sumber daya alam, penerapan teknologi pertanian modern, dan diversifikasi usaha pertanian. pendampingan juga penting untuk membantu petani mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan mengoptimalkan produksi pertanian.
5. Pemasaran dan promosi; Pemerintah desa dapat memfasilitasi pemasaran dan promosi produk pertanian dari wilayah mereka. mereka dapat membantu petani dalam mengakses pasar, Menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan mengorganisir kegiatan promosi seperti pameran atau festival pertanian, dengan demikian Pemerintah desa dapat membantu meningkatkan pendapatan petani dan memperluas jangkauan pemasaran produk pertanian
6. Pengelolaan resiko dan keadaan darurat; Pemerintah Desa perlu terlibat dalam pengelolaan risiko dan keadaan darurat yang dapat mempengaruhi sektor pertanian mereka dapat membantu petani dalam menghadapi bencana alam wabah penyakit tanaman atau hewan atau fluktuasi harga komoditas Pemerintah Desa juga dapat mengkoordinasikan asuransi pertanian atau program perlindungan pertanian.

METODE PENELITIAN

Rancangan menyeluruh diperlukan, Agar dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran fenomena atau kenyataan yang ada, baik bersifat alami maupun rekayasa manusia.

Jenis Penelitian ini dengan jenis penelitian studi kasus. Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan yang terjadi pusat perhatian. Penelitian ini berlokasi di kabupaten Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara).Terkait tentang peran pemerintah dalam mengendalikan tingkat daya saing kelompok petani di kabupaten Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan: (1) tektik wawancara, merupakan teknik utama yang digunakan dalam pengumpulan data yang diajukan kepada kelompok petani Bolaang Mongondow. (2) teknik observasi, yang digunakan dengan maksud untuk mengamati secara langsung. serta (3) teknik dokumentasi, yang dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara .

PEMBAHASAN

Peran pemerintah dalam mengendalikan kelompok petani dapat dilihat dari beberapa peran pemerintah baik regulator, dinamisator,fasilitator,dan katalisator yang dimana kita dapat melihat penelitian ini maka kami mengambil bebrapa pendapat yang di kemukakan oleh (Arif dan Adhawati 2012;9)

1. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu pemerintah menyiapkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peratursn-peraturan dalam rangka efektifitas dan tata tertib administrasi pembangunan).Sebagai regulator pemerintah desa membuat aturan dan program-program tentang pemberdayaan kelompok tani, memberikan acuan dasar yang selanjutnya dapat diterjemahkanoleh masyarakat sebagai instrument untuk boleh dapat mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dalam kelompok tani yang ada.Peran pemerintah yang paling terasa salah satunya adalah di bidang pembuatan kebijakan yang mempengaruhi secara keseluruhan. Melalui regulasi pemerintah, pada tingkat pertanian sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya pengelolaan kegiatan pertanian masyarakat dalam

menciptakan inovasi-inovasi yang baru dalam pertanian. Dalam pemberdayaan petani pemerintah desa telah melakukannya dengan terbentuknya gabungan kelompok tani dan berupa pemberian penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah lewat PPL untuk memberdayakan petani di Desa Mobuya. Pembentukan gapoktan untuk menunjang aktivitas pertanian masyarakat, sehingga memudahkan pemerintah menyalurkan berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah masih dirasakan sulit oleh masyarakat dikarenakan belum adanya aturan dan arahan dari pemerintah tersebut. Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator Dalam pelaksanaan peran sebagai Dinamisator pemerintah desa memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, mampu dalam mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan. Kemudian kendala yang dirasakan masyarakat dalam kegiatan kelompok tani yaitu dalam pembagian bantuan yang ada tidak diberikan secara merata terhadap semua kelompok tani. Pemberian bibit yang unggul yang tidak sesuai dengan lingkungan yang ada di desa sehingga mempengaruhi hasil produksi petani. Serta kendala yang dirasakan pemerintah yaitu kurang minatnya petani mengikuti berbagai sosialisasi pertanian, penyuluhan dan pelatihan. Pemerintah dituntut dapat mengatasi kendala yang dirasakan kelompok tani dan mampu memberikan motivasi untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam kelompok tani serta memperhatikan setiap keluhan dari anggota kelompok tani

2. Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator pemerintah desa bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal, kepada masyarakat. Pemerintah Desa Mobuya telah memberikan apa yang telah diberikan pemerintah daerah kepada kelompok tani berupa alat pertanian, kemudian juga telah memberikan bantuan benih jagung dan pupuk bersubsidi. Namun itu semua belum mampu mengoptimalkanke kebutuhan anggota kelompok tani, karena belum terciptanya kerja sama antara pemerintah dan petani dalam melaksanakan kegiatan pertanian yang ada. Karena bebarapa anggota kelompok tani sudah mendapatkan bantuan baik berupa pupuk bersubsidi, alat pertanian ataupun bibit, namun anggota kelompok tani yang lain belum mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Peran pemerintah sebagai fasilitator sangat penting dalam menunjang kegiatan pembangunan

yang ada di desa, fasilitas bukan hanya berfokus pada pemberian sarana tapi juga harus memperhatikan prasarana yang ada karena kurangnya prasarana seperti pupuk sangat berpengaruh terhadap jalannya pertanian yang ada, karena masalah pupuk di Indonesia merupakan permasalahan yang menyentuh langsung kebutuhan dan keberlangsungan lahan pertanian, selain itu pemerintah juga harus mampu memberikan bimbingan teknis dan non teknis terus menerus kepada kelompok tani yang sifatnya mendorong dan memberdayakan kelompok tani agar mereka dapat merencanakan, membangun dan mengelolah sendiri sarana dan prasarana pemberdayaan, serta mampu melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya.

3. Peran Pemerintah Desa Sebagai Katalisator

Dalam rangka mengoptimalkan peran pemerintah sebagai katalisator pemerintah juga perlu mendorong partisipasi pihak lain yang kompeten dalam pembangunan prasarana dan sarana pembangunan, seperti pihak swasta dan swadaya masyarakat. Pemerintah juga perlu mendorong terjadinya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Penting juga diperhatikan adalah kesiapan pemerintah desa dalam menyediakan modal bagi kelompok tani.

KESIMPULAN

Dalam Jurnal ini, Peneliti menyoroti berbagai kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah seperti, sebagai regulator, Sebagai Fasilitator, dan Sebagai Katalisator. Jadi, Program ini untuk mendukung pertanian dan meningkatkan produktivitas petani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengendalikan tingkat daya saing kelompok petani di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sangat penting dan memberikan dampak positif. Dengan adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah, petani dapat meningkatkan produktivitas mereka, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan mereka.

Namun, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti akses terbatas terhadap teknologi pertanian modern, perubahan iklim, dan kerentanan terhadap fluktuasi harga pasar. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mendukung petani dan meningkatkan daya saing mereka perlu terus ditingkatkan dan diperkuat.

Secara keseluruhan, jurnal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam mengendalikan tingkat daya saing kelompok petani di Bolaang Mongondow, Sulawesi

Utara. Upaya pemerintah dalam memberikan bantuan, pelatihan, dan dukungan finansial kepada petani telah membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan daya saing petani di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- (Novita Anjarsari, Risky Nurfadila, and Iswatul Saldina 2021) Firdaus, Riska. 2020. “Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara.” *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal* 3 (1): 32–40.
- Prianto, W. 2023. “Peran Pemerintah Desa Atari Jaya Melalui Prodak Hukum Terhadap Pertanian Masyarakat.” *Lakidende Law Review* 2 (1): 383–92. <http://delarev.com/index.php/go/article/view/45%0Ahttp://delarev.com/index.php/article/download/45/41>.
- Sadono, Dwi. 2008. “Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian Di Indonesia.” *Jurnal Penyuluhan* 4 (1). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v4i1.2170>.
- (Firdaus 2020) Firdaus, Riska. 2020. “Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara.” *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal* 3 (1): 32–40.
- roh, G. S. (2015). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Politico*, 3(2).